

## ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN PETANI TERHADAP FLUKTUASI HARGA KOMODITAS PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP

Purwati Ratna Wahyuni<sup>1</sup>

Amir Hamzah<sup>2</sup>

Mohammad Anwar<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Wiraraja Madura

[amirhamzah@wiraraja.ac.id](mailto:amirhamzah@wiraraja.ac.id)

### ABSTRACT

*Penelitian ini mengungkap berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan hukum di sektor pertanian Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah telah merancang kebijakan seperti subsidi input pertanian, program stabilisasi harga melalui koperasi, dan pengawasan distribusi hasil pertanian untuk melindungi petani dari fluktuasi harga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan anggaran, penyimpangan distribusi bantuan, dan lemahnya pengawasan. Banyak petani tidak memahami hak-hak mereka dalam kebijakan hukum yang berlaku, yang diperparah oleh minimnya edukasi hukum. Akibatnya, petani tidak dapat memanfaatkan program yang ada secara maksimal dan tetap bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen dengan harga rendah. Fluktuasi harga komoditas pertanian menjadi tantangan utama yang memengaruhi pendapatan petani. Ketika harga turun, petani menderita kerugian besar, sementara saat harga naik, keuntungan tidak sebanding dengan biaya produksi. Respon pemerintah terhadap krisis harga sering terlambat, sementara koperasi petani belum optimal dalam membantu petani karena keterbatasan sumber daya dan manajemen. Hambatan lain termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, dan dinas terkait, serta infrastruktur yang buruk, seperti akses jalan ke pasar yang memengaruhi biaya transportasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya peningkatan edukasi hukum, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan peran koperasi, serta koordinasi antarpihak yang lebih baik. Dengan langkah strategis ini, kebijakan hukum dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.*

*Keywords : Legal Policies, Price Fluctuations, Farmer Protection, Agricultural Commodities*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomiannya. Sebagian besar penduduk, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor ini. Sektor pertanian tidak hanya penting dalam menyediakan kebutuhan pangan nasional tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan

nasional. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah fluktuasi harga komoditas pertanian yang dapat merugikan petani secara ekonomi.

Fluktuasi harga komoditas pertanian tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga pada kestabilan ekonomi daerah, terutama di wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor ini seperti Kabupaten Sumenep. Ketika harga komoditas turun drastis, petani sering kali mengalami kerugian

besar. Sebaliknya, ketika harga naik, keuntungan yang diperoleh sering kali tidak mampu menutupi biaya produksi yang semakin meningkat. Ketidakpastian ini menyebabkan banyak petani terjebak dalam siklus utang yang sulit dihindari.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan tembakau menjadi andalan utama bagi petani di daerah ini. Namun, potensi ini belum diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal, sehingga petani sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai kesejahteraan. Ketidakstabilan harga di pasar menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka.

Penurunan harga yang signifikan, terutama pada saat panen raya, adalah salah satu masalah utama yang dihadapi petani. Selain itu, kenaikan harga input pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida juga menjadi beban tambahan bagi petani. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh sering kali sangat minim, bahkan tidak jarang petani harus menanggung kerugian. Dalam situasi seperti ini, petani yang tidak memiliki modal cukup sering kali bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Tengkulak sering menawarkan harga yang jauh di

bawah harga pasar, sehingga petani tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk melindungi petani dari risiko fluktuasi harga dan permasalahan lainnya. Salah satu kebijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas stabilitas harga, meningkatkan akses petani terhadap sumber daya pertanian, dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar.

Di tingkat lokal, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep juga telah berupaya menerapkan berbagai program untuk melindungi petani. Program-program tersebut meliputi pemberian subsidi pupuk, pembentukan koperasi tani, dan pengaturan distribusi hasil pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, efektivitas program-program ini masih menjadi tantangan besar.

Implementasi kebijakan hukum di sektor pertanian Kabupaten Sumenep menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman petani terhadap kebijakan yang ada. Banyak petani yang tidak mengetahui hak-hak mereka

sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan program-program pemerintah secara maksimal.

Minimnya edukasi hukum menjadi salah satu penyebab utama dari masalah ini. Petani sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi terkait regulasi dan program-program yang dirancang untuk melindungi mereka. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan petani, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi harga pasar secara real-time.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, dan lembaga terkait lainnya juga menjadi kendala yang signifikan. Koordinasi yang lemah ini menyebabkan program-program yang dirancang tidak dapat berjalan efektif di lapangan. Misalnya, subsidi pupuk sering kali tidak sampai kepada petani yang membutuhkan karena adanya penyimpanan dalam distribusinya.

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan perlindungan petani. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki dana yang cukup untuk mendukung program-program seperti subsidi pupuk, stabilisasi harga, dan pengembangan koperasi tani. Dalam

beberapa kasus, keterbatasan anggaran ini menyebabkan program yang dirancang tidak dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak langsung pada pendapatan petani. Ketika harga turun, petani mengalami kerugian besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha tani mereka. Dalam kondisi ini, banyak petani yang harus menjual aset mereka atau mengambil pinjaman untuk menutupi biaya produksi. Sebaliknya, ketika harga naik, keuntungan yang diperoleh sering kali tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan biaya produksi.

Dampak lain dari fluktuasi harga adalah ketidakstabilan pasokan pangan di daerah. Ketika petani tidak mampu memproduksi hasil pertanian secara optimal akibat kerugian yang mereka alami, pasokan pangan lokal dapat terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap petani tidak hanya penting untuk kesejahteraan mereka, tetapi juga untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan hukum di sektor pertanian Kabupaten Sumenep. Pertama, edukasi

hukum bagi petani harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak yang dimiliki. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi petani dan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai regulasi dan program-program pemerintah.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat menyediakan platform digital yang memungkinkan petani untuk mengakses informasi harga pasar secara real-time. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi distribusi bantuan dan subsidi secara lebih transparan.

Ketiga, peran koperasi tani perlu diperkuat. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen dan pendanaan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dalam membantu petani menghadapi fluktuasi harga. Selain itu, koperasi dapat menjadi wadah bagi petani untuk meningkatkan posisi tawar mereka di pasar.

Keempat, koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, dan lembaga terkait lainnya harus diperbaiki. Pemerintah daerah perlu membentuk forum koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat berjalan efektif.

Kelima, infrastruktur pertanian seperti akses jalan menuju pasar perlu ditingkatkan. Infrastruktur yang memadai akan membantu petani dalam memasarkan hasil panen mereka dengan lebih efisien, sehingga mereka dapat memperoleh harga yang lebih baik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara rinci permasalahan dan dinamika yang terjadi dalam sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yakni wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang relevan, seperti petani, aparat pemerintah daerah, dan organisasi petani. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap kebijakan hukum yang berlaku serta tantangan yang dihadapi.

Selain itu, studi dokumen juga dilakukan untuk menganalisis regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta peraturan daerah yang relevan. Studi dokumen ini memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang menjadi dasar untuk menilai implementasi program pemerintah. Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap

dinamika pasar dan aktivitas pertanian di wilayah Sumenep, seperti interaksi petani dengan tengkulak, proses distribusi hasil panen, dan kondisi infrastruktur yang mendukung aktivitas pertanian.

Analisis data dilakukan secara induktif, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi ini diolah secara sistematis untuk menemukan pola-pola, hubungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan hukum di sektor pertanian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan secara mendalam dan menghasilkan temuan yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

## HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengungkapkan berbagai dinamika dalam implementasi kebijakan hukum yang berlaku di sektor pertanian Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah telah merancang kebijakan berupa subsidi input pertanian, program stabilisasi harga melalui koperasi, serta pengawasan distribusi hasil pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang kerap menjadi

momok utama dalam sektor pertanian. Namun, realisasi kebijakan tersebut masih menemui banyak kendala. Subsidi yang dijanjikan sering kali tidak terealisasi dengan baik karena keterbatasan anggaran dan adanya penyimpangan distribusi. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi hasil pertanian juga dinilai belum optimal, sehingga banyak petani tidak merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang telah dirancang.

Salah satu persoalan yang signifikan adalah minimnya pemahaman petani terhadap kebijakan hukum yang ada. Hasil wawancara menunjukkan mayoritas petani tidak mengetahui hak-hak mereka dalam sistem perlindungan hukum. Kondisi ini membuat mereka tidak dapat memanfaatkan kebijakan dan program yang telah disediakan oleh pemerintah secara maksimal. Minimnya edukasi hukum bagi petani menjadi salah satu penyebab utama lemahnya implementasi kebijakan. Edukasi yang kurang juga memperparah ketergantungan petani terhadap tengkulak. Banyak petani yang masih menjual hasil panen melalui tengkulak dengan harga jauh di bawah harga pasar, karena mereka tidak memiliki akses informasi atau kemampuan untuk menjual langsung ke pasar. Ketergantungan ini berdampak signifikan pada pendapatan petani yang

kerap kali tidak sebanding dengan biaya produksi yang mereka keluarkan.

Fluktuasi harga komoditas pertanian menjadi tantangan besar yang sangat memengaruhi stabilitas ekonomi petani. Ketika harga komoditas turun drastis, petani menderita kerugian besar yang mengancam keberlangsungan usaha tani mereka. Sebaliknya, saat harga naik, keuntungan yang didapatkan petani sering kali tidak cukup menutupi biaya produksi yang juga meningkat. Respon pemerintah terhadap krisis harga sering kali dinilai lambat, sehingga petani harus menanggung kerugian dalam waktu yang cukup lama sebelum ada intervensi. Selain itu, peran koperasi tani yang seharusnya menjadi solusi dalam stabilisasi harga juga dinilai belum maksimal. Keterbatasan sumber daya dan manajemen yang kurang efektif menjadi kendala utama dalam meningkatkan kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan petani.

Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, dan dinas terkait menjadi faktor lain yang menghambat implementasi kebijakan hukum. Sinergi yang lemah ini menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak berjalan efektif di lapangan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan menuju pasar, juga menjadi hambatan besar bagi petani dalam

memasarkan hasil panen mereka. Infrastruktur yang buruk menyebabkan biaya transportasi meningkat, sehingga margin keuntungan yang diterima petani semakin kecil. Kendala ini diperparah dengan keterbatasan teknologi informasi di kalangan petani. Padahal, teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk memberikan informasi harga pasar secara real-time, sehingga petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menjual hasil panennya.

Distribusi bantuan kepada petani juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Observasi menunjukkan bahwa sering terjadi penyimpangan dalam distribusi bantuan. Bantuan sering kali tidak sampai kepada petani yang membutuhkan atau distribusinya tidak merata. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani dan mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi tantangan utama dalam mendukung program-program yang seharusnya membantu petani. Subsidi pupuk dan stabilisasi harga, misalnya, sering kali terkendala oleh anggaran yang tidak mencukupi.

Dengan berbagai kendala yang ada, diperlukan langkah strategis untuk memperbaiki implementasi kebijakan hukum di sektor pertanian Kabupaten Sumenep. Edukasi hukum bagi petani

harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak yang dimiliki. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi petani dan koperasi, untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi juga harus diprioritaskan agar petani memiliki akses terhadap informasi harga pasar secara real-time. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang ada dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.

#### PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan hukum yang berlaku di sektor pertanian Kabupaten Sumenep masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah, seperti subsidi input pertanian, program stabilisasi harga melalui koperasi, dan pengawasan distribusi hasil pertanian, dirancang untuk memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman fluktuasi harga. Namun, kendala implementasi, seperti keterbatasan anggaran dan penyimpanan dalam distribusi bantuan, menjadi penghalang utama bagi petani untuk merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya

celah dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan yang perlu segera diperbaiki agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

Minimnya pemahaman petani terhadap kebijakan hukum juga menjadi salah satu persoalan mendasar. Sebagian besar petani tidak mengetahui hak-hak mereka dalam sistem perlindungan hukum yang tersedia. Minimnya edukasi hukum membuat petani tidak mampu memanfaatkan berbagai program yang telah disediakan pemerintah. Akibatnya, banyak petani tetap bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka, meskipun tengkulak sering menawarkan harga yang jauh di bawah harga pasar. Ketergantungan ini tidak hanya merugikan petani secara finansial tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan rantai distribusi yang lebih efisien.

Fluktuasi harga komoditas pertanian juga menjadi tantangan besar yang memengaruhi stabilitas ekonomi petani. Ketika harga turun drastis, petani sering kali menderita kerugian besar yang mengancam keberlangsungan usaha tani mereka. Sebaliknya, saat harga naik, keuntungan yang diperoleh petani sering tidak sebanding dengan peningkatan biaya produksi. Kondisi ini diperburuk oleh respon pemerintah yang lambat terhadap situasi krisis harga. Keterlambatan ini menyebabkan petani

harus menanggung kerugian selama beberapa waktu sebelum ada intervensi yang nyata dari pemerintah daerah.

Peran koperasi tani yang seharusnya menjadi solusi dalam membantu petani mengatasi fluktuasi harga juga dinilai belum maksimal. Keterbatasan sumber daya dan manajemen yang kurang efektif menjadi kendala utama bagi koperasi untuk memberikan dampak yang signifikan. Padahal, koperasi dapat menjadi alat yang strategis untuk memperkuat posisi tawar petani di pasar, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan meningkatkan stabilitas pendapatan petani. Peningkatan kapasitas koperasi melalui pelatihan dan dukungan sumber daya perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah.

Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, dan dinas terkait menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Sinergi yang lemah antara pihak-pihak ini menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, subsidi pupuk yang seharusnya membantu petani sering kali terhambat distribusinya karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait dan distributor. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses jalan menuju pasar,

semakin memperburuk situasi. Kondisi jalan yang buruk meningkatkan biaya transportasi hasil panen, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan yang diperoleh petani.

Keterbatasan teknologi informasi di kalangan petani juga menjadi masalah yang signifikan. Padahal, teknologi informasi dapat memberikan akses real-time terhadap informasi harga pasar, sehingga petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menjual hasil panennya. Namun, banyak petani di Kabupaten Sumenep yang belum familiar dengan teknologi ini, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah perlu mendorong penggunaan teknologi informasi dengan menyediakan pelatihan dan fasilitas yang mudah diakses oleh petani.

Selain itu, distribusi bantuan kepada petani masih sering kali menemui berbagai masalah. Observasi menunjukkan bahwa bantuan sering kali tidak sampai kepada petani yang membutuhkan atau distribusinya tidak merata. Penyimpangan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani dan mengurangi efektivitas program yang telah dirancang. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga menjadi tantangan besar dalam mendukung program-program seperti subsidi pupuk



dan stabilisasi harga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih efektif dan transparan untuk memastikan program-program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai kendala ini meliputi peningkatan edukasi hukum bagi petani, penguatan koordinasi antarpihak, dan pemanfaatan teknologi informasi. Edukasi hukum perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada petani tentang hak-hak mereka dan bagaimana memanfaatkan kebijakan yang ada. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan organisasi petani, koperasi, dan dinas terkait untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi prioritas untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi pasar.

Secara keseluruhan, perbaikan dalam implementasi kebijakan hukum di sektor pertanian Kabupaten Sumenep membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah, organisasi petani, koperasi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi petani. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan berbagai kendala yang ada dapat diatasi, sehingga

kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep dapat meningkat secara signifikan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum di sektor pertanian Kabupaten Sumenep masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun pemerintah daerah telah merancang kebijakan seperti subsidi input pertanian, program stabilisasi harga melalui koperasi, dan pengawasan distribusi hasil pertanian, pelaksanaannya belum optimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, penyimpangan distribusi bantuan, kurangnya edukasi hukum bagi petani, ketergantungan pada tengkulak, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, dan dinas terkait.

Minimnya pemahaman petani terhadap kebijakan yang berlaku menjadi hambatan signifikan dalam pemanfaatan program-program yang telah disediakan pemerintah. Hal ini diperburuk oleh infrastruktur yang kurang memadai dan terbatasnya akses petani terhadap teknologi informasi, yang dapat memberikan mereka akses real-time terhadap harga pasar. Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas pertanian tetap menjadi ancaman utama bagi stabilitas ekonomi petani, yang

diperparah dengan lambatnya respon pemerintah terhadap situasi krisis harga.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan edukasi hukum bagi petani, penguatan peran koperasi tani, pemanfaatan teknologi informasi, dan perbaikan koordinasi antarpihak yang terlibat. Dengan upaya yang terintegrasi, kebijakan hukum yang telah dirancang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan mengurangi kerentanan petani terhadap fluktuasi harga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, F. A., & Wawo, A. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan *Corporate social responsibility* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(2), 181–195. <https://doi.org/10.24252/v6i2.2883>
- Fadhilah, N., & Nazar, M. R. (2023). Pengaruh Diversitas Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Dan Komite Audit Terhadap *Corporate social responsibility Disclosure* Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Kompas 100 Tahun 2018-2021. 10(5), 3814–3828.
- Hanna, L. A., Prihatni, R., & Purwohedhi, U. (2023). Pengaruh Agresivitas Pajak, *Leverage*. dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR). *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 325–341. <https://doi.org/10.21009/japa.0402.02>
- Hasanah, H., & Rudyanto, A. (2020). Determinan Pengungkapan *Corporate social responsibility* Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Equity*, 22(2), 215–238. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.932>
- Hitipeuw, S. D., Kuntari, Y., & Triani. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas, dan Media terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 40–51. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.135>
- Hotria, & Afriyenti, M. (2017). Pengaruh Agresivitas Pajak, Media Exposure, Profitabilitas, dan Sertifikat ISO 14001 terhadap Minat Pengungkapan CSR (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017). 6(2), 1311–1330. <https://doi.org/10.24036/wra.v6i2.102514>
- Indriyani, A. D., & Yuliandhari, W. S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate social*

- responsibility* . Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 6(1), 1559–1568.  
<https://doi.org/10.33197/jabe.v016.iss1.2020.466>
- Pare, Y. K., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate social responsibility* pada Perusahaan Perbankan Konvensional di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(2), 317–329.  
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18631>
- Rindiyawati, A., & Arifin, J. (2018). Determinan Pengungkapan *Corporate social responsibility* pada Industri Perbankan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 19(1), 48–60.  
<https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.244>
- Rivandi, M., & Putra, R. J. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate social responsibility* . Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 5(2011), 513–524.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.468> Pengaruh
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh *Corporate social responsibility* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 6(1), 47.  
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Saragih, A. E., & Sembiring, Y. C. B. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate social responsibility* Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 5(2), 139–164.  
<https://doi.org/10.54367/jrak.v5i2.183>
- Sijum, A. A., & Rustia, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap *Corporate social responsibility* . Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 7(1), 62–71.  
<https://doi.org/10.26905/ap.v7i1.5767>
- Siregar, D. A., & Tampubolon, E. G. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Maneksi, 8(2), 223–229.  
<https://doi.org/10.31959/jm.v8i2.393>
- Sularsih, H., & As’adi. (2022). Profitabilitas, likuiditas dan *Leverage* terhadap corporate social responbility (CSR) pada perusahaan terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. Jurnal Paradigma Ekonomika, 17(2), 451–460.  
<https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.17905>
- Susilowati, F., Zulfa, K., & Hartono, A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Tipe Industri, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Corporate social*

- responsibility Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Perio. *Jurnal: Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 15–25. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i2.186>
- Teng, S. H., Cahyani, A., Isabella, S. O., & Aisyah, F. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan SubSektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1464–1474. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.768> Pengaruh
- Ulla, A., Tanor, L. A. O., & Marunduh, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage*
- Kurdi, M., & Firmansyah, I. D. (2020). Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Di Kabupaten Sumenep Melalui E-COMMERCE. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 569-575.
- Kurdi, M. (2019). Analisis kelayakan finansial usaha ayam ras petelur di Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 3(1).
- Kurdi, M., Rustam, T. A., SE, M., Sari, A. P., Julyanthry, S. E., Handayani, K., ... & SE, M. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Media Sains Indonesia*.
- Firmansyah, I. D., Kurdi, M., & Zakki, N. (2023). Pengembangan Terhadap *Corporate social responsibility*. *Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1), 52–61. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4033>
- Wijayana, E., & Kurniawati. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Return On Asset dan Umur Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 11(2), 157–171. <https://doi.org/10.30813/jab.v11i2.1388>
- Wulandari, S., & Zulhaimi, H. (2017). Pengaruh Profitabilitas terhadap *Corporate social responsibility* Pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1477–1488. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i2.8515>
- Strategi Bisnis Dengan Analisis Swot Pada Pabrik Kripik Singkong Sumenep. *VALUE*, 4(1), 89-99.
- Kurdi, M., Kurniawati, D., Andrianingsih, V., Furqani, A., Alfiyah, N., & Arifin, M. (2021, May). The Government's Role in MSMEs Development Through E-Commerce in Sumenep Regency. In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*.
- Arifin, M., Kurdi, M., & Anwar, S. (2021). Strategi Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada

- Amanda Cafe Di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal MISSY (Management and Business Strategy)*, 2(1), 32-37.
- Lewaherilla, N. C., Wardhana, A., Kurdi, M., Rismanty, V. A., Kurniawati, D., Sari, E. J., ... & Fahmi, A. (2021). MSDM (Kunci Keberhasilan Organisasi). *Media Sains Indonesia*.
- Anwar, S., & Kurdi, M. (2020). Penerapan Sistem Absensi Finger Print Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Displin Kerja Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 404-410.
- Kurdi, M. (2019). Analisis kepuasan konsumen terhadap produk rengginang lorjuk Cap Jempol Kecamatan Pragaan Sumenep. *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7(01), 27-33.
- Kurdi, M., Fatmawati, F., Santosa, R., Wahyuni, P. R., & Anwar, M. (2023). Strategi Pengembangan SDM Petani Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Kesejahteraan Di Sektor Pertanian Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 308-315.
- Kurdi, M., & HRA, C. (2023). Teori dasar manajemen. *Dasar manajemen dalam organisasi*, 1.
- Fujiyastutik, T. O., & Kurdi, M. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Displin Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. BUMM Kabupaten Sumenep. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 161-173.
- Kurdi, M. (2020, April). Beyond Salt Industries and Environment in Sumenep: Effective Partnership for People Welfare. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 469, No. 1, p. 012085)*. IOP Publishing.